BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Umum Perusahaan

1. Masa Penjajahan Belanda

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan Tahun 1942 di Indonesia telah di kenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik Pemerintah, Daerah Otonom (*Gemente*) maupun swasta ataupun Patungan antara Pemerintah dan Swasta.

Di Jawa barat (khususnya kota Bandung) Perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM),* Yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah Perusahaan Perseroan *Gemeenschappellijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (G.E.B.E.O) yang menggantikan BEM dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen No. 213 Tanggal 31 Desember 1919.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942 – 1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Dijgyo Sha Bandoeng Shi Sa dengan wilayah kerja diseluruh pulau Jawa.

3. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah RI, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 Tahun 1958 jo peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 tentang penentuan Listrik dan Gas milik Belanda pada tahun 1961 berdasarkan peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Milik Negara (BPI – PLN), sebagai wadah kesatuan Pimpinan PLN.

Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan PLN dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU – PLN di Jawa Barat dengan wilayah kerja diseluruh Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.

Berdasarkan peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tatkerja perusahaan umum listrik negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah, kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek. 1975 tanggal 14 Juli 1976, PLN Exploitasi XI diubah namanya

menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dengan adanya peraturan RI No. 23 Tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menajdi perusahaan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT sejak 30 juli 1994 sesuai Akte Pendirian.

2.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat terdiri :

1. Unsur Pimpinan adalah Pemimipin Distribusi
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :
   - . Bidang Perencanaan
   - . Bidang Konstruksi
   - . Bidang Pengusahaan
   - . Bidang Keuangan
   - . Bidang Kepegawaian dan Administrasi
3. Unsur Pelaksana adalah
   - . Unit Cabang
   - . Pengatur Distribusi
   - . Unsur Pengawasan adalah Kontrol Intern.

Struktur Organisasi dalam Perusahaan merupakan hal yang sangat penting, Dengan adanya Struktur Organisasi ini, maka akan mempermudah dalam pembagian tugas sesuai dengan bidang masing – masing.

UNIVERSITAS TEKNIK PERHOTELAN UNIKOM

Pada PT. PLN (Persero) Bandung Utara, Struktur Organisasi dan Tugas pokok PLN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 117/DIR/85 TANGGAL 14 Agustus 1985 dengan dilengkapi surat keputusan pimpinan PLN Distribusi Jawa Barat No. 006/DJB/88 Tanggal 11 Maret 1988.

Struktur Organisasi PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berupa garis fungsional dan staff. Untuk lebih memahaminya penulis akan menguraikan dalam bentuk bagan Struktur Organisasi khususnya pada bidang keuangan (Dilampirkan).

2.3 Deskripsi Jabatan

Pemimpin , tugas, wewenang dan tanggung jawab pemimpin yaitu :

a. Memimpin, mengurus dan mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasil guna dari distribusi.
b. Menguasai, memelihara dan mengurus hasil kekayaan hasil distribusi.
c. Mewakili distribusi didalam dan diluar pengadilan.
d. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus distribusi yang telah digariskan oleh Direksi.
e. Menetapkan kebijaksanaan distribusi sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi.
f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan .

g. Mengadakan dan memelihara Tata Buku dan Administrasi Distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan .

h. Menetapkan gaji, Pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Menetapkan kebijaksanaan distribusi dibidang perencanaan pembangunan sarana Pendistribusian Tenaga Listrik , Mengelola dan mengendalikan semua kegiatan distribusi berdasarkan kebijaksanaan direksi dan Perundang– undangan yang berlaku

j. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi pemimpin dan Kepala Kontrol Intern

k. Melaksanakan kegiatan – kegiatan lainnya dengan persetujuan Direksi

Deputi Pemimpin Bidang Perencanaan

Tugas Pokok Bidang Perencanaan, adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik, kebutuhan Investasi, penyediaan dana dan informasi serta melaksanakan analisis dan avaluasi kinerja distribusi.

Deputi Pemimpin Bidang Konstruksi

Tugas Pokok Bidang Konstruksi adalah mengelola pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Deputi Bidang Pengusahaan

Tugas pokok bidang pengusahaan adalah merencanakan, mengendalikan dan membina pengoprasian dan pemeliharaan sarana

pendistribusian tenaga listrik pelayanan kepada pelanggan tenaga listrik dan listrik pedesaan.

Deputi Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Tugas pokok bidang kepegawaian dan Administrasi adalah melaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, Administrasi dan umum, serta pelayanan Hukum dan hubungan masyarakat.

Deputi `Pemimpin Bidang keuangan

Tugas pokok bidang keuangan adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan.

Pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangan bagian keuangan, meliputi :

- Penyusunan dan pemantauan anggaran pendapatan dan belanja distribusi serta pembinaan tarif dasar listrik
- Pengelolaan pendapatkan data
- Pengelolaan aliran uang
- Pembelanjaan pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik
- Pelaksanaan dan pembinaan sistem Akuntansi
- Pelaksanaan tata usaha langganan
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian keuangan Meliputi :

- Bagian Anggaran

- Bagian Keuangan
- Bagian Akuntansi
- Bagian Tata Usaha langganan

Bagian Anggaran

Tugas pokok bagian Anggaran adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja pengusahaan, serta kebutuhan dana pemugaran dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bagian Keuangan

Tugas pokok bagian keuangan adalah membina dan mengendalikan keuangan, pembelanjaan pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik, serta melaksanakan tata usaha keuangan.

Bagian Akuntansi

Tugas pokok bagian Akuntansi adalah melaksanakan akuntansi umum dan pengusahaan, serta akuntansi pembangunan dan sarana pendistribusian tenaga listrik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian akuntansi terdiri atas :

1. Seksi Akuntansi Perusahaan
2. Seksi Akuntansi Pengusahaan

Ad. 1 Seksi Akuntansi Perusahaan

Tugas pokok seksi akuntansi pengusahaan adalah melaksanakan kegiatan akuntansi umum distribusi dan pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangannya.

Fungsi Seksi Akuntansi antara lain adalah :

. Pelaksanaan akuntansi umum distribusi

. Pelaksanaan akuntansi pengusahaan pendistribusian tenaga listrik

. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

Ad. 2 Seksi Akuntansi Konstruksi

Tugas pokok seksi akuntansi konstruksi adalah melaksanakan kegiatan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta akuntansi aktiva tetapnya

Fungsi dari Seksi Akuntansi Konstruksi yaitu :

. Pelaksanaan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana listrik

. Pelaksanaan akuntansi aktiva tetap sarana pendistribusian listrik

Bagian Tata Usaha Langganan

Tugas pokok bagian tata usaha langganan adalah melaksanakan dan membina sistem tata usaha langganan penjualan tenaga listrik serta tariff dan hasil usaha.

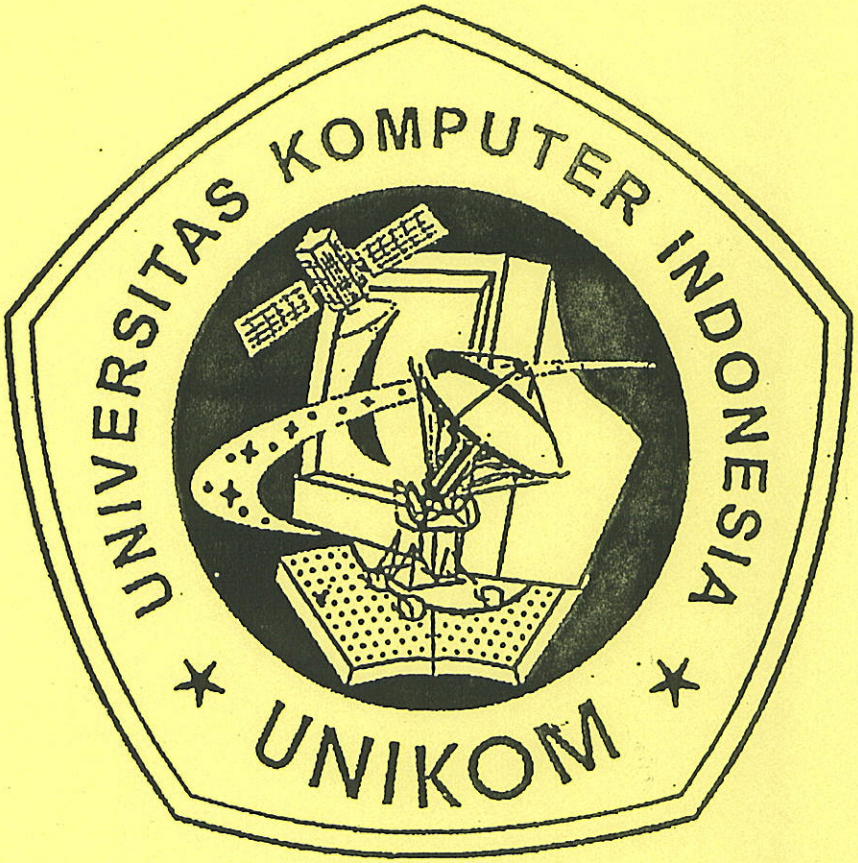
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan negara yang bergerak dalam usaha jasa kelistrikan, adapun aspek kegiatan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

UNIKOM

2. Mengusahakan persediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai, dengan tujuan untuk :
   - Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   - Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan tenaga listrik.
   - Merintis kegiatan - kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
   - Menyelenggarakan usaha - usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM